

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2023

NO	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi / pertimbangan)			Jangka Waktu (disebutkan Jangka Waktunya)
		Semula	Pengubahan	Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
				Dibuka	Ditutup	Ditutup	
1	Data Pegawai BPBD Provinsi Jawa Barat	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 17 huruf j		Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga dari penyalahgunaan pihak yang tidak berkepentingan		Tidak terbatas
2	Dokumen Laporan Keuangan yang belum diaudit	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf l dan j 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf l 4. 4. Permenpan RB Republik Indonesia Nomor Per/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawas		Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga dari penyalahgunaan pihak yang tidak berkepentingan		Terbatas (sampai selesai diaudit oleh BPK)
3	Informasi Dokumen Barang Milik Negara	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-undang Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik Pasal 17 huruf j		Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menjaga dari penyalahgunaan pihak yang tidak berkepentingan		Tidak terbatas (adanya perintah hakim/pengadilan)
4	Konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password Badan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab V. Informasi yang dikecualikan Pasal 17 g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang		Berpotensi apabila dibuka dapat mengganggu sistem aplikasi dan database kedinasan	Menjaga dari penyalahgunaan pihak yang tidak berkepentingan		Tidak terbatas (sampai dengan penetapan pemenang)

5	Rincian DPA	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 b dan e		Berpotensi membahayakan ketahanan ekonomi nasional	Menjaga dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan dan sebagai kerahasiaan untuk persaingan yang sehat		Terbatas
---	-------------	---	--	--	--	--	----------

Bandung, Januari 2023

Pih. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT



Ir. BUDI JUANDA, M.M
NIP. 19660325 199303 1 007